

Naskah kerja • Research article

Partisipasi Elektoral dan Ketimpangan Spasial Sumber Daya Kampanye: Pelajaran dari Pilkada DKI Jakarta 2024

Tim Riset Teras Urban ^a^a Global Socio-Urban Advisory Centre, Teras Urban, Jakarta, Indonesia**INFORMASI ARTIKEL****Riwayat naskah**

8 menit baca

Versi naskah: 2026

Kata kunci

partisipasi pemilih, golput, ekonomi pemungutan suara, segmentasi spasial, Pilkada DKI

Keywords

voter turnout, abstention, economics of voting, spatial segmentation, Jakarta election

Klasifikasi: ilmu politik, ekonomi politik, analisis spasial**ABSTRAK**

Partisipasi pemilih pada Pilkada DKI Jakarta 2024 tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah penyelenggaraannya. Naskah ini menganalisis fenomena tersebut melalui teori partisipasi politik dan ekonomi pemungutan suara, lalu menautkannya dengan persoalan alokasi sumber daya kampanye. Kami berargumen bahwa strategi yang diterapkan seragam lintas wilayah dengan karakteristik sosial berbeda menghasilkan inefisiensi spasial. Segmentasi berbasis data pada tingkat daerah pemilihan ditawarkan sebagai pendekatan yang lebih efisien, dengan tetap menjunjung netralitas dan etika.

ABSTRACT

Abstract. Voter turnout in the 2024 Jakarta gubernatorial election was the lowest on record. This paper analyzes the phenomenon through theories of political participation and the economics of voting, then links it to campaign resource allocation. We argue that uniformly applied strategies across socially heterogeneous areas produce spatial inefficiency. Data-driven segmentation at the electoral-district level is proposed as a more efficient approach, while upholding neutrality and ethics.

Sorotan • Highlights

- Partisipasi 2024 turun tajam ke tingkat terendah dibanding 2007 sampai 2017.
- Selisih besar antara daftar pemilih dan suara sah mengindikasikan segmen yang tidak terjangkau mobilisasi.
- Segmentasi pemilih berbasis daerah pemilihan yang netral dapat mengarahkan program partisipasi inklusif.

1. Pendahuluan

Partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 tercatat sekitar 53,05 persen dari sekitar 8,2 juta pemilih terdaftar, terendah sepanjang sejarah pilkada Jakarta.^{[1][2]} Penurunan ini penting bukan hanya secara normatif (legitimasi), tetapi juga karena menyiratkan persoalan efisiensi dalam mobilisasi pemilih.

Partisipasi pemilih merupakan indikator legitimasi demokrasi lokal sekaligus cerminan kualitas mobilisasi politik. Penurunan partisipasi pada pemilihan kepala daerah, ketika terjadi setelah periode partisipasi tinggi, menuntut penjelasan yang melampaui faktor administratif semata.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Teori ekonomi pemungutan suara memodelkan keputusan memilih sebagai fungsi manfaat, probabilitas pengaruh, dan biaya partisipasi.^[5] Literatur partisipasi politik menambahkan peran mobilisasi, identifikasi kandidat, dan kelelahan elektoral. Kerangka ini relevan untuk Jakarta 2024, di mana penyelenggaraan pemilu nasional dan pilkada pada tahun yang sama serta dinamika pencalonan disebut sebagai faktor penurunan partisipasi.^{[2][3]}

Literatur perilaku memilih mengaitkan keikutsertaan dengan biaya dan manfaat memilih yang dirasakan, dengan intensitas kontak kampanye, dan dengan persepsi atas kompetisi yang berarti. Dalam kerangka ini, distribusi sumber daya kampanye secara spasial menjadi penting, karena daerah yang kurang tersentuh mobilisasi cenderung menunjukkan partisipasi lebih rendah.

3. Data dan Metode

Naskah memakai data resmi penyelenggara dan pemberitaan terverifikasi sebagai basis deskriptif, lalu menafsirkannya melalui kerangka teori partisipasi dan alokasi sumber daya.^{[1][2][3]} Analisis bersifat kualitatif-deskriptif; klaim spasial diajukan sebagai hipotesis kebijakan, bukan estimasi kausal.

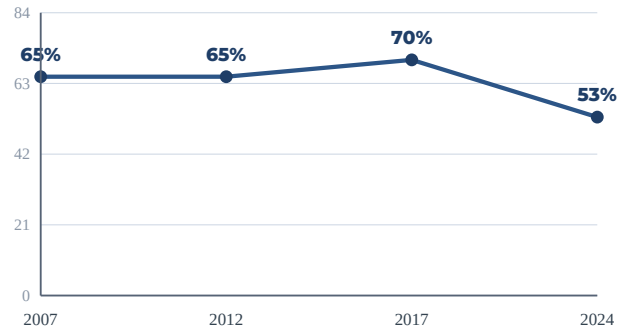
Tabel 1. Sumber data utama dan cakupan.

Sumber	Jenis data	Cakupan / periode
KPU (via media terverifikasi)	Partisipasi & DPT	DKI Jakarta, 2024
Tempo / Kompas / CNA (2024)	Konteks & faktor	DKI Jakarta
Catatan historis KPU	Partisipasi 2007–2017	DKI Jakarta

Naskah menggunakan data partisipasi dan daftar pemilih dari penyelenggara pemilu yang dirujuk melalui media terverifikasi, dilengkapi catatan historis untuk menempatkan angka 2024 dalam konteks lintas periode. Karena data resolusi tempat pemungutan suara tidak seluruhnya tersedia secara terbuka, analisis dibatasi pada tataran agregat dan pada perbandingan antarwaktu.

4. Hasil

Selain angka 53,05 persen, catatan penyelenggara menunjukkan tingkat tidak memilih (golput) mendekati 42–47 persen, kontras dengan partisipasi sekitar 65 persen pada 2007 dan 2012 serta lebih dari 70 persen pada 2017.^{[2][4]} Faktor yang berulang disebut mencakup kelelahan akibat tahun pemilu ganda dan konfigurasi pencalonan.^[3]



Gambar 1. Tingkat partisipasi pemilih Pilkada DKI antarperiode (persen). Sumber: catatan KPU.

Gambar 1 memperlihatkan partisipasi yang relatif tinggi dan stabil pada periode 2007 hingga 2017, lalu menurun tajam pada 2024 ke tingkat terendah dalam rangkaian tersebut. Besarnya penurunan mengindikasikan perubahan struktural dalam keterlibatan pemilih, bukan sekadar fluktuasi acak antarpemilihan.

Selisih antara daftar pemilih dan suara sah yang besar menyiratkan bahwa segmen pemilih tertentu tidak terjangkau secara efektif. Pemetaan segmen dan wilayah dengan partisipasi rendah dapat mengarahkan upaya pendidikan pemilih yang netral secara lebih tepat sasaran.

5. Pembahasan

Dari sudut alokasi sumber daya, strategi kampanye yang seragam lintas wilayah mengabaikan heterogenitas sosial-ekonomi antardaerah pemilihan, sehingga sumber daya tidak dialokasikan ke segmen dengan potensi mobilisasi tertinggi. Hal ini menghasilkan inefisiensi spasial yang sejalan dengan rendahnya partisipasi.

Pendekatan berbasis data, yang memetakan karakteristik pemilih per daerah pemilihan, memungkinkan penargetan yang lebih presisi. Namun, penggunaannya menuntut tata kelola etis: independensi, netralitas, dan perlindungan data.

Bagi penyelenggara dan organisasi masyarakat sipil, temuan ini menggarisbawahi nilai segmentasi pemilih berbasis daerah pemilihan untuk merancang program partisipasi yang inklusif. Pendekatan ini bersifat netral dan ditujukan untuk memperluas keterlibatan, bukan untuk memihak kandidat tertentu.

6. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Pertama, gunakan segmentasi spasial berbasis data demografi dan perilaku untuk merancang mobilisasi yang proporsional terhadap kebutuhan tiap daerah pemilihan. Kedua, lembagakan prinsip netralitas dan kode etik penggunaan data dalam aktivitas elektoral. Ketiga, perkuat pendidikan pemilih yang dirancang sesuai konteks lokal untuk mengatasi kelelahan elektoral.

7. Keterbatasan dan Agenda Riset Lanjutan

Analisis ini bertumpu pada data agregat dan pemberitaan. Riset lanjutan sebaiknya memakai data tingkat tempat pemungutan suara (TPS) untuk menguji hubungan antara karakteristik wilayah dan partisipasi secara ekonometrik.

Keterbatasan utama adalah ketiadaan data resolusi tinggi pada tingkat tempat pemungutan suara yang akan memungkinkan analisis ketimpangan spasial secara langsung. Riset lanjutan yang memperoleh data tersebut dapat menguji hubungan antara intensitas mobilisasi dan partisipasi secara lebih kausal.

8. Kesimpulan

Rendahnya partisipasi Pilkada DKI 2024 mencerminkan persoalan legitimasi sekaligus efisiensi. Segmentasi spasial berbasis data, yang dijalankan secara independen dan etis, menawarkan jalan untuk mengalokasikan sumber daya mobilisasi secara lebih tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- [1] Tempo (2024). "Disebut Terendah Sepanjang Sejarah, Berapa Jumlah Partisipasi Pemilih Pilkada Jakarta 2024?" <https://www.tempo.co/pemilu/disebut-terendah-sepanjang-sejarah-berapa-jumlah-partisipasi-pemilih-pilkada-jakarta-2024--1174855>
- [2] Kompas (2024). "Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta dan Sumut Rendah." <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/16432371/partisipasi-pemilih-di-pilkada-jakarta-dan-sumut-rendah-hanya-57-dan-55>
- [3] Tempo (2024). "Tingkat Partisipasi Pilkada Jakarta 2024 Terendah Sepanjang Sejarah: Sebab-sebabnya." <https://www.tempo.co/politik/tingkat-partisipasi-pilkada-jakarta-2024-terendah-sepanjang-sejarah-pengamat-politik-beberkan-beberapa-sebab-1178501>
- [4] CNA Indonesia (2024). "47% golput di Pilkada DKI Jakarta 2024." <https://www.cna.id/indonesia/47-golput-di-pilkada-dki-jakarta-2024-meroket-hampir-25-tertinggi-dalam-sejarah-24906>
- [5] Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row.

Pernyataan

Ketersediaan data

Data partisipasi dan daftar pemilih bersumber dari penyelenggara pemilu yang dirujuk melalui media terverifikasi sebagaimana tercantum pada Daftar Pustaka.

Pendanaan

Riset ini didanai secara mandiri oleh Teras Urban. Penyusunan tidak menerima hibah atau penugasan dari lembaga komersial, instansi pemerintah, maupun organisasi politik mana pun.

Benturan kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada benturan kepentingan dalam penyusunan naskah ini.

Kontribusi penulis

Konsepsi dan desain riset, pengumpulan dan analisis data sekunder, penyusunan tabel dan grafik, serta penulisan naskah dikerjakan oleh Tim Riset Teras Urban.

Sitasi yang disarankan

Tim Riset Teras Urban (2026). "Partisipasi Elektoral dan Ketimpangan Spasial Sumber Daya Kampanye: Pelajaran dari Pilkada DKI Jakarta 2024". TU-WP-2026-04. Teras Urban, Jakarta.

Penafian

Naskah kerja ini bersifat sementara dan terbuka untuk penelaahan. Naskah belum melalui peer-review formal. Seluruh angka mengikuti sumber yang dikutip pada Daftar Pustaka; nilai pada grafik bersifat indikatif sesuai sumber dan dapat berubah jika data primer diperbarui.